

# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAYANAN KOMUNIKASI OLEH HUMAS PEMERINTAH DAERAH KEPADA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOJONEGORO(Studi pada Humas Pemerrintah Daerah Kabupaten Bojonegoro)



Oleh: Kristina Susanti ( 01220067 )

Dept. of Communication Science

Dibuat: 2008-03-26 , dengan 3 file(s).

**Keywords:** Faktor-faktor pengaruh, pelayanan komunikasi, Humas pemerintah.

Perjalanan Humas pemerintah dalam kinerjanya tidak selalu mulus, ada berbagai banyak hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi dengan Dinas terkait. Ada faktor penghambat dan segi organisasi ataupun dari segi personal. Yang menjadi rumusan masalah disini adalah factor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi hambatan layanan komunikasi Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam kinerjanya kepada Dinas Pendidikan Nasioanal Kabupaten Bojonegoro. Penelitian juga dilakukan untuk tujuan mendeskripsikan pelayanan komunikasi oleh Humas Pemerintah daerah kepada Dinas Pendidikan dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat pelayanan komunikasi oleh Humas Pemerintah Daerah kepada Dinas Pendidikan. Subdin Humas dan Media Informasi Kabupaten Bojonegoro menggunakan media massa baik berupa cetak ataupun elektronik untuk alat publikasinya. Hal tersebut sesuai dengan aktivitas Humas sebagai sumber pelayanan komunikasi dan antara hubungannya dengan hubungan pers. Subdin Humas dan Media Informasi ini difungsikan oleh Dinas-Dinas terkait di Kabupaten Bojonegoro sebagai sarana publikasi Dinas. Penelitian ini mengambil studi komunikasi hanya di Dinas Pendidikan dan keseluruhan Dinas yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Dasar pengambilan studi Komunikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro oleh peneliti adalah frekuensi publikasi tentang Dinas Pendidikan yang sering muncul di media massa dibandingkan dengan Dinas terkait lainnya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif karena peneliti ingin mengetahui secara menyeluruh segala aspek yang memuat tentang komunikasi antara Subdin Humas dan Media Informasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dari semua aspek yang menjadi faktor-faktor penghambat pelayanan komunikasi antara Humas Pemerintah dengan Dinas Pendidikan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan pendokumentasian dari semua sumber. Analisis data dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif interaktif.

Dari hasil penelitian dapat diuraikan faktor-faktor yang menjadi penghambat pelayanan komunikasi oleh Humas Pemerintah kepada Dinas Pendidikan seperti mobilitas kerja pejabat Dinas yang tinggi menyebabkan sering terjadi ketidaksinkronan waktu yang sesuai dengan Humas ataupun pihak media massa

Effectively of Government Public Relation have a rare problems with other department, organizationally and personally. The main problems is, what kinds of factors that fencing the service in Kabupaten Bojonegoro. This research conduct to describe communication service and fence factors at government public relation to Department of Education.

Government Public Relation and information media Kabupaten Bojonegoro use mass media and electronic media as communication tools. This action is relating with Public Relation

responsibility that had to have relation with press and all related department in Kabupaten Bojonegoro. The research's base on the frequency of Department of Education publication in mass media comparing with other department.

This research is descriptive qualitative, because the writer want to know all aspect in communication of all department in Kabupaten Bojonegoro and the fence factors of communication service among department. Data collecting technique are observation, interview and documentation. Data analysis with interactive qualitative data.

The research result describe the fence of communication service by government public relation to Department of Education such as work high mobility that makes different perception among department even for mass media, few of medium and infrastructure in government public relation to support the work, less of coordinating between government and mass media make few information. Formal meeting only in Secretariat office of Kabupaten Bojonegoro. The other fence is district government can't control mass media access to visit Department of Education or others. The responsibilities only for Government Public Relation as mediator to other department, especially Department of Education.